SUPAYA TAK MERASA KESEPIAN

Jokowi Harus 'Merebut' Golkar

YOGYA (KR) - Presiden terpilih Prabowo Subianto tak akan mudah disandera Presiden Joko Widodo. Dengan perjalanan panjang yang sudah empat kali maju menjadi calon presiden (capres), setelah duduk di kursi RI-1 nanti tidak mungkin akan mengalah pada Jokowi. Jadi, masa depan pemerintahan, bukan masa depan Jokowi.

Founder dan CEO PolMark Indonesia Eep Saefullah Fattah mengemukakan hal itu dalam 'Srawung Demokrasi #1' di Auditorium Kampus UII di Jalan Cik Ditiro, Selasa (20/8) saat menjawab pertanyaan prediksi pemerintahan periode mendatang.

Dalam diskusi yang diselenggarakan Pusat Studi Agama & Demokrasi (PSAD) UII dilaksanakan terlambat hingga satu jam dan menampilkan narasumber lain Kepala PSAD UII Prof Dr Masduki yang mengambil tema 'Munaslub Golkar dan Problematika Partai Politik di Indonesia'.

Oleh sebab itu, menurut Eep, Jokowi harus 'merebut' Golkar. "Karena Jokowi adalah presiden yang kesepian, tidak memiliki partai," ujarnya.

Disebutkan Eep, masa kekuasaan Prabowo nanti, tidak dapat mengulang kekuasaan Jokowi, sekalipun ada anaknya yang menjabat sebagai wapres. Menurutnya, ada level lain yang bisa dibentuk Prabowo dimana dalam level itu bisa saja Jokowi menjadi ketuanya.

Namun tandas Eep, jangan berpikir akan membuat Jokowi bisa memengaruhi Prabowo. Bagaimanapun Prabowo sebagai presiden kelak bukan hanya memiliki kekuasaan, tetapi juga kewenangan. "Itulah sebabnya, tinggal dua bulan berada di kursi presiden, Jokowi masih *bermain lumpur* dengan melakukan *reshuffle* kabinet," ucapnya.

Di awal pembicaraan, CEO PolMark Indonesia ini mengajak untuk melihat pengunduran diri Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bukan dipandang sebagai potret. Jika dilihat sebagai potret, akan dikatakan ia berprestasi membawa Golkar sebagai peraih suara kedua.

"Lihatlah semua ini sebagai rangkaian adegan sejak 2017 yang mengantar Airlangga Hartarto meraih kursi Ketua Umum Partai Golkar, waktu itu adalah Jokowi. Kalau yang bikin jatuh adalah Jokowi, itulah langgam politik," jelasnya.

Secara politik dalam memerintah, menurutnya, Jokowi mengembangkan sejumlah model. Nomor satu loyalitas insentif, maka pemburu rente, pemburu bancakan disediakan dalam langgam kekuasaan Jokowi dan menjadi loyalis. Selain itu, juga mengembangkan model loyalitas berbasis penyanderaan. **(Fsy)-d**

MUNAS XI PARTAI GOLKAR

Bahlil Calon Tunggal, Bisa Aklamasi

JAKARTA (KR) - Calon Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Bahlil Lahadalia menggandeng tangan Plt Ketum Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) dan Wakil Ketum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) ketika tiba di acara Musyawarah Nasional (Munas) XI Partai Golkar, di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Selasa (20/8).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menjadi calon tunggal Ketum Partai Golkar itu, tiba di JCC sekitar pukul 15.45 WIB untuk mengikuti Munas yang dibuka pukul 16.00 WIB. Adapun Bahlil menjadi calon tunggal setelah mendaftarkan diri pada Senin (19/8).

Dengan hanya Bahlil sebagai calon tunggal, proses pemilihan bisa berlangsung secara aklamasi maupun tidak, karena hal itu bakal tergantung dari para pemilik suara pada Munas XI.

Sebelumnya, Bahlil, AGK dan Bamsoet *digadhang-gadhang* sebagai kandidat Ketum Partai Golkar setelah Airlangga Hartarto menyatakan mundur. Namun Agus Gumiwang setelah terpilih menjadi pelaksana tugas ketum menyatakan tidak akan mencalonkan diri. Bamsoet juga menyatakan hal serupa dan menyatakan mendukung Bahlil sebagai calon ketum.

Munas didahului Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada Selasa pagi. Rencananya Munas digelar selama dua hari, yakni Selasa hingga Rabu (20-21/8).

Pada Munas itu akan diselenggarakan pemilihan ketum serta penetapan ketum pada Rabu (21/8). Rencananya penutupan munas tersebut dihadiri Presiden Joko Widodo dan Presiden Terpilih Pemilu Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Partai Golkar memastikan kadernya yakni Bahlil Lahadalia bakal menjadi calon tunggal dalam pemilihan Ketum Partai Golkar yang akan diselenggarakan pada Munas XI Partai Golkar.

Ketua Pengarah Munas XI Partai Golkar Adies Kadir mengatakan, selama proses pendaftaran, ada dua orang yang mendaftar yakni Ridwan Hisjam dan Bahlil Lahadalia. Namun, dari verifikasi berkas yang dilakukan, menurutnya, hanya Bahlil yang dinyatakan lolos.

"Berkas pendaftaran bakal calon atas nama Bahlil Lahadalia dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan sebagai calon ketua umum pada Munas XI Partai Golkar Tahun 2024," kata Adies.

Ia mengatakan, pendaftaran Ridwan Hisjam dinyatakan tidak lolos karena tak memenuhi syarat. Menurutnya, dari tujuh persyaratan untuk menjadi calon ketua umum, ada dua poin yang tidak terpenuhi oleh Ridwan, salah satunya yakni surat dukungan. **(Ant/Obi)-f**

LAPORAN BAKAL DITANGANI BAWASLU

Polisi Hentikan Kasus Pencatutan KTP

JAKARTA (KR) - Polda Metro Jaya telah berkomunikasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait penghentian pengusutan kasus pencatutan Nomor Induk Kepegawaian (NIK) warga DKI Jakarta untuk mendukung calon perseorangan, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Laporan pencatutan NIK tersebut selanjutnya bakal ditangani badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Telah berkomunikasi juga dengan Bawaslu karena berdasarkan UU 10 Tahun 2016 rekan-rekan dari Bawaslu bahwa Polda Metro Jaya pada awalnya menerima laporan tersebut untuk melayani masyarakat," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi saat ditemui di Jakarta, Selasa (20/8).

Dijelaskan, laporan tersebut bakal ditangani oleh Bawaslu karena hal tersebut telah diatur dalam Pasal 185A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. "Bagi masyarakat yang masih merasa dirugikan mohon dapat juga menempuh jalur hukum. Silakan itu sesuai hak warga negara terkait peristiwa yang sama dengan bisa mengadukan langsung ke Bawaslu," katanya.

Ade Ary menambahkan, pihak Kepolisian memang berwenang menerima laporan tersebut. Namun, laporan tersebut bakal diarahkan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu DKI Jakarta. "Kita fokus pada pencatutan NIK, kita lakukan pemberhentian penyelidikan dengan dasar azas tadi, kemudian selanjutnya kami sarankan masyarakat buat laporan ke Bawaslu," katanya.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah menghentikan laporan warga DKI Jakarta berinisial S (45) terkait dugaan pencatutan KTP untuk mendukung Dharma Pongrekun-Kun Wardana dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta 2024 melalui jalur perseorangan.

"Telah dilakukan gelar perkara atas penanganan perkara 'aquo' pada Senin, tanggal 19 Agustus 2024 dan forum gelar sepakat untuk menghentikan penyelidikan atas penanganan perkara 'aquo'," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Safri Simanjuntak. **(Ant/Has)-f**